BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional ini mengalami banyak perkembangan. negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Hubungan internasional adalah kunci utama negara atau dasar-dasar negara sebagai dari salah satu bagian dari interaksi negara-negara dalam dunia

internasional, dimana negara sebagai aktor utama. Menurut Robert Jackson & George Sorenson mengemukakan bahwa:

> "Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negaranegara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (Jackson & Sorenson, 2005: 3).

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan yang harus di pelajari dan dipahami, karena kebutuhannya sangatlah komplek pada dewasa ini dengan frekuensi yang tinggi. Menurut Holsti yang dikutip oleh T. May Rudy menyatakan bahwa:

> "Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*)" (Rudy, 2003: 2).

Suatu interaksi dilakukan karena adanya saling membutuhkan diantara negara-negara tersebut. Melalui interaksi ini, akan terjalin suatu pola hubungan yaitu hubungan internasional. Pola hubungan atau interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan dan pertentangan. Tentunya dalam berlangsungnya hubungan internasional yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut "*high politics*".

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. Menyatakan bahwa:

> "Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Karena sifatnya yang demikianlah kajian hubungan internasional dapat menerima dan membahas tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat internasional, hal ini juga berdasarkan pada suatu kondisi tertentu yaitu melibatkan peran-peran negara atau sering disebut bersifat *"inter-nation"* dalam sebuah dinamika sistem internasional (Mingst, 2003 : 83).

Pada dasarnya, hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan. Setiap negara akan melakukan interaksi

dengan negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan mencapai suatu kepentingan bersama. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut didasari oleh adanya keterbatasan dari tiap negara dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka.

2.1.2 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi di antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Hubungan ini dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Beberapa organisasi seperti PBB menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung di antara negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Hubungan yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Hubungan bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi (Perwita & Yani, 2005 : 42).

Menurut Muhammad Iqbal Fadillah dalam tulisannya “Prospek Hubungan Bilateral Indonesia dan Amerika: Membangun Saling Pengertian”. Fadillah mengemukakan bahwa :

> "Kerjasama bilateral adalah adalah suatu kerjasama antara dua Negara dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Kerjasama bilateral dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan dinegaranya masing-masing (Fadilah, 2005:1)."

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian
2. Tukar menukar Duta Besar
3. Kunjungan kenegaraan

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup Kedutaan Besar terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik, 2008: 85-87).

Hubungan bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya dan ekonomi di antara 2 negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri *(freewill)*.

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Perjanjian bilateral bersifat khusus *(treaty contract)* karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Menurut T. May Rudy mengatakan bahwa :

> "Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional" (Rudy, 2002: 27).

Menurut Perwita dan Yani, Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua pihak. Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut:

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di Negara penerima.
3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (Perwita & Yani, 2005:42)

Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan

dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara *state-to-state,* dimana yang didalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai pelanan pembuat keputusan. Pada dasarnya, bilateralisme adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh dua negara (pemerintahan) yang memiliki kepentingan dalam peningkatan atas beberapa aspek mayor seperti ekonomi, politik, dan pertahanan. Kelebihan dari Hubungan bilateral adalah yang pertama hubungan ini cenderung mudah dilakukan karena yang terlibat hanya 2 (dua) negara dan aturan tidak begitu kompleks. Yang kedua bagi negara besar, dengan adanya konsep hubungan bilateral ini dapat menekan negara dari lawan kerjasamanya untuk mematuhi dan mengikuti aturan yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga adalah kalkulasi dan pencapaian pertimbangan tidak begitu rumit. Hubungan bilateral dan multilateral disebabkan oleh banyak faktor, misalnya faktor geografis, faktor kesamaan kepentingan dan kesamaan permasalahan. Kedua negara menganggap bahwa melalui kerjasama dapat meningkatkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan, baik disisi ekonomi, ekonomi pembangunan dan lain sebagainya. .

Hubungan bilateral merupakan salah satu istilah daripada bentuk-bentuk interaksi dalam Hubungan Internasional berdasarkan pada banyaknya pihak yang melakukan interaksi. Interaksi dilakukan antara dua negara untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Salah satu bentuk dari hubungan yang melewati batas-batas negara yang dijalin antara dua negara yang bertujuan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Perwita bahwa bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan atas:

> "Berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi, serta pola interaksi yang terbentuk, dan di dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya (*recurrent*) sehingga membentuk suatu pola tertentu, sedangkan bentuk-bentuk interaksi berdasarkan benyaknya pihak yang melakukan hubungan, antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, dan multilateral/internasional" (Perwita & Yani, 2005: 42)."

Hubungan bilateral juga terjadi karena kepentingan nasional suatu negara tidak dapat terpenuhi dari dalam negerinya sendiri, disini hubungan bilateral merupakan cara suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

2.1.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 34).

Sejak awal, fokus dari hubungan internasional mempelajari penyebab-penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama-kerjasama yang dapat tercipta sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyesuaian prilaku oleh para aktor dalam rangka merespon dan mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lainnya.

Menurut T. May Rudy ada 2 (dua) bentuk dan pola kerjasama, yaitu:

1. Kerjasama Pertahanan-Keamanan *(Collective Security)*
2. Kerjasama Fungsional *(Functional Co-operation)* (Rudy, 2009: 8).

Setiap orang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan bernegara dalam sistem internasional. Sebuah Negara tidak dapat lepas dari Negara lain. Kepentingan dasar Negara menjalin hubungan internasional dengan Negara lain adalah kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya Negara-negara ini tentu harus saling mengadakan hubungan dengan Negara lainnya (Rudy, 2003: 8).

2.1.4 Keamanan

Pada awalnya pengertian keamanan identik dengan dunia militer. Fenomena ini tampaknya sejalan dengan dominasi pendekatan realis di dalam sistem internasional. Kondisi ini terus berlangsung hingga puluhan tahun dan mencapai puncaknya pada masa perang dingin dimana dunia terbagi ke dalam dua kutub berbeda yang saling beroposisi di bawah dua negara adidaya, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Menurut Kolodziej adalah sebagai berikut:

> "Keamanan (security) adalah bentuk khusus dari politik. Semua masalah keamanan adalah masalah politik. Namun tidak semua konflik politik adalah masalah keamanan. Keamanan menjadi isu utama sengketa politik ketika aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain (Susetyo, 2008: 2)".

Dengan berakhirnya Perang Dingin dan menguatnya berbagai isu non-militer, pengertian keamanan mengalami perubahan. Keamanan tidak lagi identik dengan isu-isu militer namun juga isu-isunon militer, seperti kemiskinan, HAM, ketersediaan pangan dan lain-lain. Simon Dalby, dalam Pengantar Hubungan Internasional,

mengatakan bahwa keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar Negara, tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat (Perwita & Yani, 2005: 119).

Sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan *"The Copenhagen School"* seperti Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde pada akhir 1990-an mencobame masukkan aspek-aspek di luar hirauan tradisional kajian keamanan. Menurut mereka dengan memasukkan isu keamanan non tradisional seperti halnya masalah kerawanan pangan, epidemic penyakit menular, kemiskinan, lingkungan hidup, dan sebagainya kedalam lingkup kajian keamanan, maka *the Copenhagen School* mencoba memperluas obyek rujukan, isu keamanan dengan tidak lagi berbicara hanya keamanan Negara, tetapi juga menyangkut keamanan manusia (Perwita & Yani, 2005:122).

Menurut David Held, pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini Negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan Negara (Dharmaputra, 2009: 4). Sedangkan pendapat Barry Buzan, keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (survival). Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Buzan menyebutkan bahwa: "persoalan keamanan tidaklah mungkin hanya menjadi urusan satu Negara saja tetapi membutuhkan sebuah koordinasi regional maupun internasional (Perwita & Yani, 2005:122)". Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM

dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer 38 tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non tradisional.

2.1.5 Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi termasuk dalam *human security* Keamanan Ekonomi *(Economic Security)* mengacu pada kenikmatan individu atas pendapatan dasar, baik melalui pekerjaan yang menguntungkan atau dari jaring pengaman sosial. Ancaman terhadap keamanan ekonomi: kurangnya lapangan kerja produktif dan menguntungkan, kerja apa adanya, tidak adanya jaringan pengaman sosial yang dibiayai publik.

Ancaman terhadap keamanan ekonomi yang berakibat kurangnya lapangan pekerjaan yang produktif dan menguntungkan sehingga memiliki dampak yang sangat serius, yaitu banyaknya masyarakat miskin yang pengangguran, kejahatan dimana-mana, dan anak-anak yang putus sekolah juga kelaparan yang mengakibatkan busung lapar, kematian, dan lain-lain

> "Menurut Barry Buzan, bahwa persoalan keamanan ekonomi mustahil hanya menjadi urusan satu negara saja, namun lebih membutuhkan sebuah koordinasi regional maupun internasional tetapi hal ini juga mencakup banyak hal atau urusan tentang sebuah kondisi kelangsungan kehidupan (Susetyo, 2008: 2)".

Keamanan Ekonomi sebagai pertahanan terus berkembang sebagai refleksi problema alokasi sumber daya dan tentu saja masing-masing negara memiliki perspektif masing-masing menghadapi tantang isu Ekonomi pertahanan. Umumnya penyebaran studi ekonomi pertahanan, makro dan mikro bisa didekati dari penggal waktu terjadi konflik besar, misal di era perang dunia II, lebih banyak mengait produksi besar-besaran alut dan sistem persenjataan dan logistiknya (termasuk angkutan). Era perang dingin berperan sebagai ekonomi yang membantu Kemhan, perlucutan senjata, konversi dan perdamaian. Paska perang dingin sepertinya menggarap ekonomi antara perang dan damai, sedangkan Ekonomi kontemporer lebih berminat menggarap yang berkaitan dengan peperangan konvensional, ethnik dan konflik termasuk revolusi, peperangan saudara dan peperangan panjang *(the long war)*.

Konsep keamanan Ekonomi umum biasanya diawali dari liputan makro tentang sektor penerimaan negara, alokasi dan distribusinya, menurun ke liputan mikro yang bicara tentang sistem pasar dan perilakunya, kebutuhan dan pasokan *(demand dan supply)*. Analogi problema Ekonomi pertahanan mulai dari tingkat makro tentang distribusi dan alokasi dari Dephan merujuk strategi pertahanan nasional yang bicara tentang pemilihan alternatif sumber daya sebagai *means* (ekonomik), *ways* (caranya) dan *ends* (sasaran fisikalnya).

2.1.6 Keamanan Energi

Keamanan Energi mengacu pada ketersediaan pasokan energi yang dapat diandalkan, stabil, dan berkelanjutan dengan biaya yang terjangkau. Keamanan

Energi memiliki banyak aspek, terutama dalam jangka panjang dan jangka pendek. Keamanan Energi jangka panjang terkait dengan investasi tepat waktu untuk memasok energi yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan lingkungan, baik minyak ataupun variasi jenis energi lainnya. Di sisi lain, Keamanan Energi jangka pendek berfokus pada kemampuan sistem energi untuk bereaksi secara cepat terhadap perubahan mendadak dalam keseimbangan *supply-demand* (http://www.iea.org/topics/energysecurity/ diakses tangal 18-03-2016). Keamanan energi juga dapat didefinisikan sebagai kebutuhan untuk mendapatkan pasokan energi yang cukup dan stabil dengan harga yang sesuai dan dalam kondisi yang tidak membahayakan nilai-nilai dan tujuan nasional (Yergin, 1988: 111).

Ketersediaan energi menjadi masalah yang cukup signifikan dalam hal ini. Pertama, jika suplai energi menurun, maka akan menimbulkan kenaikan harga energi yang berakibat pada turunnya daya beli energi. Hal ini akan berimbas pada kolapsnya kegiatan ekonomi dan bersifat destruktif terhadap kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat Tiongkok. Kedua, dengan ditemukannya sumber suplai energi baru, maka hal ini dapat menunda kelangkaan energi yang mungkin terjadi dan mengamankan cadangan energi dalam kurun waktu tertentu. Suplai memegang peranan yang sangat penting, karena permintaan akan energi sebagai komoditas primer cenderung selalu tetap dan bersifat inelastis (Florian Bauman, 2008: 6). Ketidakamanan global membuat lahirnya strategi keamanan energi. Hal ini sebagai salah satu cara menjamin keamanan energi yaitu melalui cara pendekatan militer.

Menurut *Asia Pacific Energy Research Centre* (APERC), beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami Keamanan Energi yang biasa disebut sebagai "*The 4 A's"* (APERC, 2007: 1-2), yaitu:

1. Ketersediaan sumber daya energi (*Energy resource availability*)

   Meliputi sumber daya energi konvensional, non-konvensional, dan terbarukan. Dalam skripsi ini, indikator *availability* dibatasi pada ketersediaan sumber daya energi minyak saja. Indikator ini mengacu pada jumlah pasokan sumber energi minyak dari sumber cadangan yang dikenal (Hughes & Shupe, 2010: 3).

2. Hambatan aksesibilitas (*Accessibility barriers*)

   Selain ketersediaan sumber daya energi, kemampuan untuk mengakses sumber daya merupakan salah satu tantangan utama untuk mengamankan pasokan energi untuk memenuhi pertumbuhan permintaan di masa mendatang. Indikator *accessibility* digunakan untuk menggambarkan hambatan yang ada dalam upaya pengadaan sumber energi, termasuk hambatan untuk mengeksploitasi dan mengembangkan sumber daya yang tersedia. Hambatan aksesibilitas pasokan energi meliputi faktor ekonomi, faktor politik, dan teknologi (APERC, 2007: 17).

3. Penerimaan lingkungan (*Environmental acceptability*)

   Indikator ini menyangkut pada masalah penerimaan oleh lingkungan dan keselamatan yang muncul akibat keberadaan sumber daya energi. Tren

permintaan energi diperkirakan dapat meningkatkan dampak lingkungan yang berhubungan dengan energi.

4. Keterjangkauan biaya investasi (*Investment cost affordability*)

   Affordability merujuk pada kemampuan konsumen untuk membayar jasa energi, modal, dan struktur biaya operasional untuk mengembangkan berbagai sumber energi (Hughes & Shupe, 2010:3).

2.2 Kerangka Pemikiran

Tiongkok merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini mendapat pengaruh besar dari sektor industri. Karena pertumbuhan industri yang pesat maka hal tersebut berimbas pada kebutuhan energi yang semakin meningkat. Tiongkok pun didorong untuk mencari sumber ke negara lain untuk terus dapat menjalankan roda peindrustian yang telah memajukan perekonomian Tiongkok, berdasarkan konsep keamanan energi dari Daniel Yergin bahwa bagi Tiongkok ketersediaan energi merupakan masalah yang cukup signifikan dalam pembangunan negara. Keamanan energi dapat didefinisikan sebagai keamanan dari ketersediaan energi dari sumber yang memadai dan dapat dipercaya dengan harga yang stabil. Keamanan energi ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karenanya, keamanan energi perlu dan penting untuk mendapat perhatian khusus dari negara. Sebagai negara yang tengah dalam masa pembangunan, Tiongkok menyadari akan hal ini. Karenanya, Tiongkok merasa perlu untuk menjalankan serangkaian kebijakan dalam rangka mengamankan energinya.

Strategi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam kebijakan luar negerinya di bidang energi adalah dengan memperbanyak jalinan kerjasama dengan berbagai Negara pengimpor sumber energi dalam jangka panjang. Sumber energi dapat meliputi minyak, batu bara, gas, air dan sumber energi lain yang dapat diperbarui. Salah satu sumber energi yang dianggap utama dan vital adalah minyak bumi dan segala turunannya. Karenanya, Tiongkok pun menaruh perhatian khusus terhadap sektor minyak negara. Para pembuat kebijakan Tiongkok menyadari bahwa untuk mencapai keamanan energi, tergantung pada reformasi pasar sektor energi dan konservasi energi. Kebijakan energi secara khusus mendorong perusahaan minyak untuk mengejar akses minyak dengan eksplorasi dan produksi di lokasi baru. Karena menjadi kepentingan nasional, kegiatan ini dekat dengan tindakan politik dan area diplomasi. Konsep keamanan energi ini mendorong perusahaan minyak negara untuk bermain di pasar internasional. Dalam rangka menjamin ketersediaan energi, salah satu strategi utama Tiongkok adalah menjalankan apa yang disebut sebagai diplomasi minyak dengan cara kebijakan *going out*. Kebijakan ini mendorong Tiongkok untuk membuka diri terhadap dunia internasional dan bersikap lebih kooperatif. Kebutuhan akan minyak dunia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta statusnya sebagai *net oil importer* membuat Tiongkok berupaya lebih untuk bersahabat dengan negara-negara lain, terutama dengan negara penghasil minyak karena Tiongkok bergantung terhadap pasokan energi dari negara-negara tersebut. Oleh sebab itu, Tiongkok membuka diri terhadap kerjasama dengan negara-negara lain, bahkan dengan negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dekat dengannya.

Dalam melakukan kerjasama, Tiongkok tidak hanya mengambil sumber daya yang dibutuhkannya dari negara-negara penghasil minyak, tetapi juga berusaha membantu pembangunan di negara tersebut, baik di sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, teknologi, dan sektor-sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok berusaha untuk mengakomodasi negara-negara mitranya dengan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih bertanggung jawab. Melalui strategi yang spesifik, Tiongkok juga mendukung pembangunan, stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian negara mitranya, sekaligus memastikan pasokan energi langsung dari negara sumbernya.

Dengan demikian, keamanan energi mendorong Tiongkok untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang menunjukkan karakteristik sebagai *responsible great power*. Kebijakan keamanan energi yang diambil oleh Tiongkok tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip awal yang dibawanya, dan kebijakan tersebut dibuat dengan tidak hanya mempertimbangkan Tiongkok untuk mendapatkan sumber energi saja, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampak penerapannya terhadap negara lain.

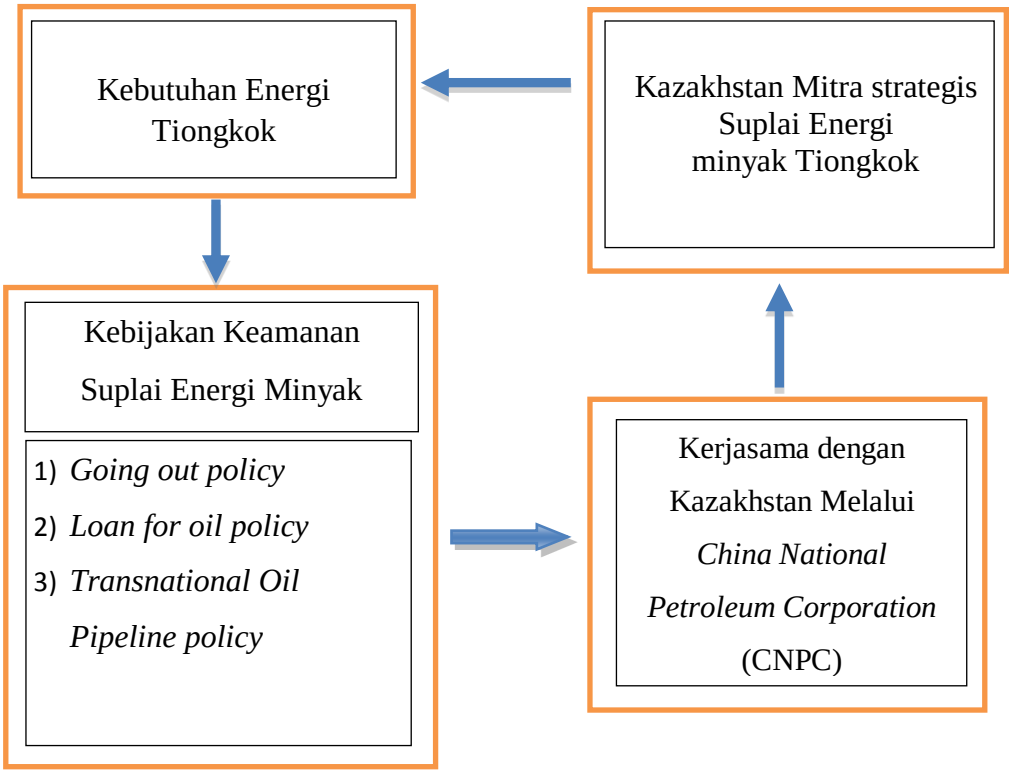
Kebijakan "*Going Out*" sebagai usaha menjamin suplai yang cukup bagi kebutuhan energi domestik Tiongkok menimbulkan sejumlah implikasi baru. Salah satunya adalah bagaimana Tiongkok harus bersikap terhadap keamanan jalur transportasi suplai energi. Kebijakan *going out* ini ditandai dengan perusahaan Tiongkok, yaitu CNPC yang berhasil memenangkan penjualan saham perusahaan minyak Kazakhstan yaitu perusahaan Aktobemunaigas pada Mei 1997. Dan pada September 1997 CNPC kembali memenangkan saham Uzenmunaigas, investasi CNPC di dua perusahaan ini menandai kerjasama energi tiongkok di Kazakhstan.

Dengan semakin banyaknya saham Tiongkok di perusahaan minyak Kazakhstan, pada kebijakan *Loan For Oil,* Tiongkok mengunci akses suplai mendatang, memperpanjang kepentingan Tiongkok di Negara-negara yang selama ini CNPC kesulitan menembus akses. Kebijakan ini juga dapat dianggap cukup strategis bagi Kazakhstan karena Tiongkok menjadi tempat untuk mendapatkan aliran tunai yang mudah dengan pinjaman yang murah.

Selain ketersediaan sumber daya energi, kemampuan untuk mengakses sumber daya merupakan salah satu tantangan utama untuk mengamankan pasokan energi untuk memenuhi pertumbuhan permintaan di masa mendatang. Konsep *accessibility* digunakan untuk menggambarkan hambatan yang ada dalam upaya pengadaan sumber energi, termasuk hambatan untuk mengeksploitasi dan mengembangkan sumber daya yang tersedia. Hambatan aksesibilitas pasokan energi meliputi faktor ekonomi, faktor politik, dan teknologi. Dalam kasus Tiongkok, hambatan aksesibilitas sumber daya minyak meliputi hambatan yang dapat bersumber dari geopolitik, kendala keuangan dan manusia, rezim fiskal, dan kebutuhan akan infrastruktur utama dan penyebaran teknologi yang memadai. Maka dikeluarkanlah kebijakan energi yaitu *Transnational Oil Pipeline* (2004-2011). Kebijakan ini beranggapan bahwa keamanan energi Tiongkok dapat tercapai apabila Tiongkok mengalihkan jalur rute transfer minyak dari jalur laut ke jalur darat.

Sesuai dengan konsep kerjasama dari Perwita & Yani bahwa kedua Negara ini merasa saling membutuhkan dengan perekonomian Kazakhstan yang terus tumbuh dengan eksplorasi sumber daya alam minyak, dan Tiongkok yang mendapatkan

suplai minyak Dari Kazakhstan untuk mencapai ketahanan energi Tiongkok. Idealnya kerjasama tersebut memberi timbal balik keuntungan ekonomi yang adil bagi Kazakhstan dan Tiongkok.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran